

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rusia merupakan negara yang memiliki tatanan politik, ekonomi dan militer yang kuat dan stabil. Negara ini terbentuk pada pasca perang dingin (*Cold War*) antar Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang terjadi pada sekitar tahun 1960-1990. Perang dingin mencapai titik akhir pada awal tahun 1990-an, Uni Soviet saat itu dipimpin oleh Mikhael Gorbachev dan membuat keputusan yang dianggap sebagai "*Blunder*". Hal tersebut disebabkan karena Presiden Gorbachev mengeluarkan kebijakan yang sangat bertentangan dengan ideologi Uni Soviet. Di akhir tahun 1991, akhirnya Uni Soviet dinyatakan bubar dan pecah menjadi beberapa negara. Hal tersebut memberikan implikasi pada keadaan politik maupun ekonomi internasional.

Salah satu negara yang menjadi bekas negara Uni Soviet adalah Rusia, negara yang paling banyak mewarisi kekuatan Uni Soviet dari segi wilayah dan kekuatan. Rusia juga mewarisi hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rusia adalah negara Superpower dengan kekuatan militernya yang sangat besar. Dilansir dari situs [globalfirepower](#) kekuatan militer Rusia menempati posisi 2 dari 133 negara yang terdaftar, Rusia hanya kalah dari Amerika Serikat dari segi kekuatan militer. Rusia memiliki

sekitar 3 juta lebih personel militer dengan rincian personel militer aktif sejumlah 798.527 orang dan militer cadangan sejumlah 2.572.500 orang.<sup>1</sup>

Rusia juga mengalami prosesnya sendiri sebagai sebuah negara, sebagai negara terbesar di benua eropa bahkan dunia dari segi geografis. Apabila dilihat dari segi politik pemerintahan, Rusia tidak menganut negara pendahulunya Uni Soviet yang sangat menganut komunis dan otoriter. Politik luar negeri Rusia sekarang lebih mengarah ke ideologi-ideologi barat, bahkan negara ini juga sudah menerima demokrasi sebagai salah satu ideologi yang diterima. Rusia secara perlahan berubah dari negara yang dulu menjadi bayang-bayang Uni Soviet dengan ideologi Komunisnya menjadi negara yang lebih demokratis dari sebelumnya.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, zaman sekarang berkembang menjadi lebih terbuka pada akses informasi, namun di sisi lain masih ada beberapa negara yang menerapkan prinsip otoriter atau bahkan totaliter dalam sistem kenegaraannya. Salah satu negara yang masih menerapkan sistem ini adalah Korea Utara. Negara ini menganut sistem totaliter dimana kekuatan terpusat pada satu pihak yaitu presiden yang saat ini dipimpin oleh Kim Jong Un. Keputusan yang dikeluarkan Kim Jong Un adalah keputusan yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat

Dengan sistem negara yang masih totaliter, Korea Utara kerap mengeluarkan kebijakan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu

---

<sup>1</sup> www.Globalfirepower.com. "2017 Russian Military Strength" dikutip dari [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=russia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=russia) pada tanggal 25 Oktober 2017

kebijakan yang kontroversial dan menjadi perhatian dunia adalah kebijakan Korea Utara mengenai kepemilikan senjata Nuklir dan uji coba rudal baru-baru ini. Kebijakan ini tentunya mendapat kecaman dari dunia internasional. Hal tersebut memicu kembali memanasnya konflik di semenanjung korea. Negara tetangga yang masih serumpun yaitu Korea Selatan merasa paling terancam dengan kebijakan Korea Utara ini. Uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara tentu tidak hanya membuat khawatir negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea dan Jepang semata. Bahkan, Amerika Serikat pun merasa terancam dan menanggapi dengan melaksanakan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Korea Utara memang sering menimbulkan kekhawatiran di dunia internasional dengan kebijakan pertahanannya yang sangatlah ekstrem. Kecaman-kecaman dan tindakan sanksi yang ditujukan kepada Korea Utara tidak membuat negara ini gentar dan takut untuk terus mengeluarkan kebijakan yang membuat negara lain merasa terancam.

Arah kebijakan Korea Utara ini membuat beberapa negara besar merasa khawatir, konflik di semenanjung korea ditakutkan akan semakin tidak bisa terhindarkan lagi. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil tindakan dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Resolusi tersebut dengan tegas mengutuk peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, selanjutnya mendesak Korea Utara untuk kembali merundingkan permasalahan ini tanpa syarat serta mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, Korea Utara tetap kukuh dengan ambisinya dan

menolak resolusi Dewan Keamanan PBB bahkan berjanji akan tetap melanjutkan uji coba rudalnya.

Sebagai sebuah negara, tentunya Rusia menjalin kerjasama dengan setiap negara di dunia, tak terkecuali hubungannya dengan Korea Utara. Sejak kunjungan pertama Presiden Vladimir Putin pada tahun 2000, kontak politik antara Moscow dan PyongYang semakin intensif. Beberapa kesepakatan kerjasama pun telah ditanda tangani. Kerjasama yang terjalin antar kedua negara ini diantaranya di bidang Ekonomi yaitu di produk minyak bumi. Rusia juga diyakini memberikan akses *routing* internet dan memberikan koneksi ke dunia luar selain Beijing, China. Perdagangan bilateral kedua negara ini mencapai 31,4 juta U\$ Dollar, pada kuartal pertama tahun 2017 meningkat dua kali lipat daripada periode sebelumnya.<sup>2</sup>

Rusia memiliki kepentingannya sendiri dalam upayanya menengahi konflik di semenanjung Korea. Kepentingan ini adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan. Dari segi kepentingan Ekonomi, Rusia menganggap bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur ini sebagian besar adalah negara yang memiliki perekonomian kuat dan stabil. Maka dari itu, Rusia ingin mencari pasar baru di wilayah Asia-Pasifik setelah Rusia sendiri terkena embargo yang dilakukan Amerika Serikat karena keterlibatan Moscow dalam konflik di Eropa Timur yaitu di wilayah Crimea.

---

<sup>2</sup> [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). “Rusia Beri Dukungan Ekonomi pada Korut” dikutip dari <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/10/05/oxc0h1359-rusia-beri-dukungan-ekonomi-pada-korut> pada tanggal 31 Oktober 2017

Dilihat dari segi kepentingan keamanan, Rusia ingin wilayah ini segera melakukan perundingan yang bersifat multilateral. Agar, permasalahan yang terjadi bisa menemukan solusi bersama dan tidak semakin memburuk. Rusia terus berupaya untuk mewujudkan kepentingan keamanan bersama di wilayah Asia Timur yang tentunya dibantu oleh kekuatan-kekuatan dari negara lainnya seperti China, Korea Selatan, Jepang dan tentunya Amerika Serikat.

Disisi lain, banyak negara mengecam kebijakan Korea Utara meluncurkan rudalnya seperti Cina yang mengecam dan menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak bijaksana. Perancis juga mengambil sikap dengan mengutuk perbuatan tersebut dan meminta dewan keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Tindakan Korea Utara juga mengambil perhatian organisasi internasional di bawah PBB yaitu IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dimana organisasi ini menangani tentang energi atom dan penggunaannya termasuk nuklir. Organisasi ini menganggap tindakan Korea Utara sangat “Mengganggu” dan telah melanggar resolusi dewan keamanan PBB.<sup>3</sup>Dengan permasalahan yang terjadi di semenanjung Korea ini, penulis ingin mengetahui tentang apa saja sikap yang akan dikeluarkan Rusia khususnya mengenai Korea Utara dan integrasi keamanan di wilayah Asia Timur.

---

<sup>3</sup> www.Kompas.com. “Korea Utara Uji Coba Nuklir, ini Reaksi Dunia” dikutip dari <https://dunia.tempo.co/read/803058/korea-utara-uji-coba-nuklir-ini-reaksi-dunia> pada tanggal 07 November 2017

## **B. Rumusan Masalah**

**“Bagaimana Sikap Rusia terhadap Peluncuran Rudal oleh Korea Utara?”**

## **C. Kerangka Konseptual**

### **Konsep Tindakan Politik Luar Negeri**

Politik atau kebijakan luar negeri (*foreign policy*) bisa diartikan sebagai kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Studi politik luar negeri, menurut Henry Kissinger, berada pada interseksi antara aspek dalam negeri (domestik atau internal) suatu negara dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara.

K.J Holsti menjelaskan kebijakan luar negeri sebagai semua aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi aktivitas tersebut. Lebih lanjut dalam buku milik Holsti yang berjudul “*International Politics: A Framework for Analysis*” menyebutkan ada 6 tindakan aktor politik mempengaruhi lainnya.

1. *Persuasif*; arti dari tindakan ini bisa dalam bentuk peringatan, penghargaan ataupun hukuman terhadap aktor lainnya. Untuk dapat mempengaruhi aktor lain dan mendapatkan respon yang direncanakan.
2. Menjanjikan penghargaan, tindakan ini memungkinkan suatu aktor memberikan penghargaan terhadap aktor lain apabila aktor tersebut telah memenuhi syarat yang telah diberikan. Setelah diberikan penghargaan, maka aktor yang memberikan ini akan menularkan pengaruhnya.
3. Mengabdikan permintaan, kondisi ini kebalikan dari poin 2, aktor politik akan memberikan/mengabdikan permintaan terlebih dahulu dengan harapan akan dimanfaatkan oleh yang dikabdikan sebagai *influencer* atau alat pengaruh.
4. Ancaman pemberian hukuman, poin ini bisa dibedakan menjadi dua, yang pertama, ancaman positif, salah satunya dengan memberikan ancaman untuk menaikkan tarif, kedua, ancaman pencabutan, dengan mencabut bantuan internasional.
5. **infliction of non violent**
6. Kekerasan/*Force*, metode ini merupakan taktik yang paling efisien dan cara paling ampuh untuk mempengaruhi.

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa yang bisa diambil sikap Rusia terhadap peluncuran rudal oleh Korea Utara adalah ;

1. Menempatkan Pasukan Bersenjata di Wilayah Rusia Timur

2. Melakukan Latihan Perang dengan China

#### **E. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisa seperti apa Rusia bersikap terhadap Korea Utara
- b. Mengetahui Politik Luar Negeri yang diambil Rusia untuk menghadapi konflik di semenanjung korea.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang penulis ambil adalah semenjak Kim Jong Un mengambil kursi kepresidenan pada tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2017 dimana Korea Utara gencar melakukan peluncuran rudal.

#### **G. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan teknik studi kepustakaan. Teknik ini mengumpulkan data dari berbagai macam sumber dan referensi terpercaya, baik itu dengan mengutip dari sebuah buku maupun pencarian data melalui internet. Selain itu penulis juga mengembangkan pemikiran dengan membahas isu-isu yang menjadi permasalahan dengan dosen-dosen maupun dengan teman-teman sekitar.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

**Bab I.** Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II.** Pada bab ini akan dijelaskan tentang politik luar negeri dari Rusia dalam sikapnya mengenai konflik semenanjung korea.



**Bab III.**Pada bab ini penulis akan membahas tentang kebijakan Korea Utara yatu uji coba rudal yang mengkhawatirkan banyak negara.

**Bab IV.**Pada bab ini penulis akan membuktikan tentang hipotesa yang penulis ambil.

**Bab V.**Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis harapkan dari para pembaca.